



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NENI SAPTANINGRUM**
2. Jabatan : **AUDITOR**
3. NHK : **249228**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/74 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA CB 150 R SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.356.549

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 333.856.549

III. HUTANG Rp. 390.831.564

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -56.975.015

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAROD MALADI GUNAWAN
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 258550

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 82.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA SERI E Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.929.197

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 335.229.197

III. HUTANG Rp. 89.303.650

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 245.925.547

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 966823

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 31.500.000

1. MOTOR, HONDA D1BO2N1 3L2 A/T Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT H1B02N42S3A Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 15.441.853

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 51.941.853

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 51.941.853

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS PRIYANTI**
2. Jabatan : **AUDITOR**
3. NHK : **274387**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	140.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	24.716.161
F. HARTA LAINNYA	Rp.	9.758.000
Sub Total	Rp.	180.474.161

III. HUTANG **Rp.** **33.978.480**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **146.495.681**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSTIN RATRIANA
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 278629

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 595.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m2/110 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 86.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 209.450.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 3.000.000

Sub Total Rp. 963.950.000

III. HUTANG Rp. 65.764.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 898.185.400

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJENG WULAN HAPSARI
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 931383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	27.600.000
1. MOTOR, HONDA VARIO X1H02N32L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 27.600.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	86.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	118.300.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	118.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEWI ATTUTIANINGRUM**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
3. NHK : **265416**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 216.770.000**

1. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 74.720.000
2. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 142.050.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 78.200.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000
3. MOTOR, YAMAHA ALFA SEPEDA MOTOR Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 32.140.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 232.536.368**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 559.646.368**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 559.646.368**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURNI HASTUTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 833752

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.773.656
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	37.873.656
III. HUTANG	Rp.	86.111.700
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-48.238.044

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKIYATNO
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 835491

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/144 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 22.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT NC11B3C A/T / MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO AIFO2N36M1 A/T / MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 6.750.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 9.064.690**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 437.814.690**

III. HUTANG **Rp. 187.733.020**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 250.081.670**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EMANUEL EKO KRISTIYANTO**
2. Jabatan : **AUDITOR**
3. NHK : **245231**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **455.000.000**

1. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 292 m2/140 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **199.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 14.500.000
4. MOBIL, WULING CONFERO S L LUX PLUS MPV Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **67.900.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **99.763.067**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **822.163.067**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 822.163.067

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAMELA DEVI CAHYARINI
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 899917

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 270.000.000

1. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.800.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HIBAH TANPA AKTA Rp.
7.900.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2012, HIBAH TANPA AKTA Rp.
5.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.923.933

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 428.223.933

III. HUTANG Rp. 347.748.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 80.475.933

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.